



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HAFIZH**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **483762**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.190.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah Seluas 19.947 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 450.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V 2.0 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 350.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 252.500.000**

Sub Total **Rp. 2.242.500.000**

III. HUTANG **Rp. 108.892.514**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.133.607.486**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.